

Judul : Tak Perlu Gunakan Pendekatan Keras
Tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kendalikan Harga Beras Tak Perlu Gunakan Pendekatan Keras

FOTO: PRABAI



Alex Indra Lukman

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta Pemerintah tidak menggunakan pendekatan represif dalam mengendalikan harga beras. Penanganan yang lebih bijak dapat dilakukan melalui penguatan distribusi dan sistem logistik pangan.

Alex lalu menyoroti pencabutan izin pedagang karena menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan ini perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha.

"Jika harga pasar naik, pemerintah sebenarnya memiliki instrumen yang sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak saat harga melonjak. Kini pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan langkah yang terkesan represif terhadap pedagang," ujar Alex di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pandangan itu disampaikan Alex menanggapi keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai kebijakan penertiban harga beras terlalu ketat. Organisasi pedagang melihat, pencabutan izin usaha pedagang yang melanggar HET dapat mengganggu aktivitas perdagangan di pasar.

Alex melanjutkan, pemerintah tidak perlu panik menghadapi kenaikan harga beras di pasaran. Fluktuasi harga merupakan hal yang bisa dikelola selama pasokan tetap terjaga.

"Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta

ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa perlu khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan, kebijakan yang terlalu ketat justru bisa membuat pedagang enggan menyalurkan beras ke pasar. Alih-alih menenangkan situasi, langkah itu malah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang hingga akhirnya menahan stok berasnya.

Menurut Alex, bentuk intervensi yang lebih tepat untuk menekan lonjakan harga beras adalah dengan memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik. "Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi agar pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar," terang Ketua Panja Pernerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI itu.

Ia menjelaskan, rantai panjang dari penggilingan ke gudang, lalu ke pedagang grosir hingga ke pengecer, membuat harga beras di pasar sulit dikendalikan. Setiap mata rantai menambah biaya mulai dari transportasi, sewa gudang, hingga administrasi. Sementara sistem logistik nasional juga belum sepenuhnya efisien.

Selain itu, Alex menyoroti kebijakan pemerintah yang menugaskan Bulog untuk membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan kualitas. Kebijakan tersebut memerlukan kesiapan teknis yang baik agar tidak menimbulkan permasalahan baru di lapangan.

"Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas tentu penuh tantangan. Karena itu, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani," jelasnya.

Alex berharap, pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih komprehensif dalam menjaga stabilitas harga beras tanpa menekan pedagang kecil yang juga tengah berjuang mempertahankan usahanya. ■ BYU